

BAB IV

KESIMPULAN

Setelah Perang Dunia II, banyak warga Korea yang menjadi korban kerja paksa menuntut kompensasi. Upaya hukum terhadap perusahaan Jepang seperti Nippon Steel dan Mitsubishi Heavy Industries mengalami berbagai kendala, dan meskipun ada perjanjian normalisasi hubungan pada tahun 1965, perselisihan terus berlanjut. Mahkamah Agung Korea Selatan pada tahun 2018 memutuskan bahwa perusahaan Jepang harus membayar kompensasi, yang memicu reaksi keras dari Jepang, termasuk pembatasan ekspor bahan kimia penting untuk industri semikonduktor Korea Selatan. Korea Selatan merespon tindakan Jepang dengan memboikot produk-produk Jepang dan menyebabkan perang dagang di antara kedua negara tersebut.

Pandangan pemerintah Korea Selatan terhadap Jepang menjadi dasar yang sangat penting dalam menentukan sikap yang akan di ambil oleh Korea Selatan terhadap Jepang, terutama dalam menyelesaikan isu *wartime forced labor* yang selalu menemui kebuntuan menghambat kepentingan nasional Korea Selatan. Salah satu upaya yang di lakukan pemerintah Korea Selatan melalui Presiden Yoon Suk Yeol adalah dengan mengajukan solusi yang belum pernah dilakukan oleh presiden-presiden Korea Selatan terdahulu yaitu membuat kesepakatan penyelesaian isu *wartime forced labor* dengan mengusahakan sendiri pemberian kompensasi kepada para korban kerja paksa.

Ekonomi merupakan sektor yang menjadi fokus utama dari Presiden Yoon. Adapun industri unggulan dari Korea Selatan di bawah kepemimpinan Presiden Yoon adalah semikonduktor, *artificial intelligence* (AI), baterai, energi ramah lingkungan dan layanan kesehatan. Untuk membuat semikonduktor, terdapat tiga bahan kimia yaitu hidrogen fluorida, fotorezist, dan polimida terfluorinasi dan Jepang merupakan pemasok utama Korea Selatan untuk bahan-bahan tersebut. Ketegangan hubungan di antara Korea Selatan dan Jepang berdampak kerugian bagi industri elektronik di Korea Selatan.

Meskipun ekonomi menjadi faktor yang memainkan peran besar dalam perubahan sikap Korea Selatan di bawah kepemimpinan Yoon Suk yeol dalam menghadapi isu *wartime forced labor*, fakta bahwa Yoon Suk Yeol berada di tim oposisi dari presiden Korea Selatan sebelumnya yaitu Moon Jae In juga dinilai turut memengaruhi sikap Yoon Suk Yeol dalam mengani *isu wartime forced labor*. Partai Kekuatan Rakyat dengan ideologi konservatif sayap kanannya berlawanan dengan Partai Demokrat Korea yang memiliki ideologi liberal tengah-kiri.

Berbeda dengan tujuan presiden-presiden Korea Selatan sebelumnya yang menginginkan pemberian kompensasi dari Jepang sebagai penyelesaian isu *wartime forced labor*, Presiden Yoon menargetkan penyelesaian isu *wartime forced labor* sebagai upaya untuk menormalisasi hubungan antara Korea Selatan dan Jepang. Presiden Yoon memandang keamanan ekonomi sebagai prioritas utamanya. Sehingga, mengusahakan sendiri pemberian kompensasi kepada korban kerja paksa tanpa bantuan Jepang dinilai sebagai opsi yang paling tepat dalam menyelesaikan isu *wartime forced labor*.

Secara keseluruhan, isu kerja paksa masa perang terus menjadi hambatan dalam hubungan Korea Selatan-Jepang. Penyelesaian yang diusulkan dengan memberikan kompensasi dari pemerintah Korea Selatan sendiri dinilai sebagai solusi yang dapat meminimalisir ketegangan dan memulihkan hubungan bilateral yang penting bagi stabilitas ekonomi dan keamanan kawasan.